# PENGARUH PENGENDALIAN AKUNTANSI DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
## (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat)

**Pembimbing**
**Wati Aris Astuti, SE.,M.Si.,Ak.,CA**

Oleh:
**DELIAH NUR SATARIDA YUSARDI**

**Program Studi Akuntansi – Fakultas Ekonomi dan Bisnis**
**UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA**

***ABSTRACT***

*This research was to known the effect Accounting Control on Performance Accountability of Government Agencies and Reporting System on Performance Accountability of Government Agencies. This research based on phenomenon that occurs in the area on Performance Accountability of local Government Agencies are still low and West Bandung District one area that the low accountability.*

*The purpose of this study is to analyze and assess how much the effect Accounting Control and Reporting System on Performance Accountability of Government Agencies at regional work unit West Bandung. This population research is the whole work unit area in West Bandung District. The sample used in this research of 43 departements or entire departements in West Bandung District with criteria by boring sampling method approach so that the total sample used was is the whole work unit area.*

*The method of analysis in this research is descriptive and verification method with statistical test is to structural equation test based variance or better known by name Partial Least Square (PLS) and hypothesis testing to test the wheter empirical evidence to support or reject the statement. This research using SmartPLS 2.0 M3 software.*

*The result showed that the Control Accounting significant impact on the Performance Accountability of Government Agencies. As well as Reporting System significant impact on the Performance Accountability of Government Agencies.*

***Keywords: Accounting Control, Reporting System, Performance Accountability of Government Agencies.***

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan kehendak kita bersama. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. (Abdul Halim 2013)

Akuntabilitas kinerja terkait erat dengan tata kelola pemerintahan yang baik, demi terwujudnya *good governance* maka dalam pelaksanaan otonomi daerah diperlukan transparasi dan akuntabilitas publik. Pemerintahan yang transparan dapat dilihat dari adanya kebebasan dan kemudahan dalam memperoleh informasi secara akurat dan memadai bagi mereka yang membutuhkan. Sedangkan akuntabel berhubungan dengan pertanggungjawaban pemerintah kepada *stakeholder* atas setiap aktivitas yang dilakukannya.(Mardiasmo 2009)

Dalam rangka pertanggungjawaban setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Laporan kinerja instansi pemerintah dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing entitas pelaporan dan atau entitas akuntansi. Sistem akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah setidak-tidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD. (PP No. 8 th. 2006 tentang Pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah) dan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. (Inpres No.7 1999)

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama suatu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. (Deddi Nordiawan 2011)

Sistem Pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi atau laporan keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk memberikan mengambil keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. (Mei Anjarwati 2012)

Pengendalian akuntansi dirancang untuk memberikan keyakinan memadai guna mencapai tujuan-tujuan yakni keandalan pelaporan keuangan dan menjaga kekayaan dan catatan akuntansi.(Siti Kurnia dan Ely Suhayati 2010)

Pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan dipatuhinya kebijakan pimpinan. Hal tersebut menekan tujuan yang hendak dicapai dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. (Indra Bastian 2011)

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban. (LAN dan BPKP 2000)

Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan menyampaikan nilai rata-rata akuntabilitas kinerja pemerintah daerah tahun 2015 masih rendah. Kondisi ini cukup menghawatirkan karena mayoritas pemerintah kabupaten/kota belum bisa mengelola anggaran sesuai dengan perencanaannya dengan akuntabel di tengah meningkatnya transfer dana dari pusat ke daerah. Akuntabilitas kinerja pemerintah kabupten/kota tahun 2015 mencapai nilai rata-rata 46,39%, naik tipis dari tahun 2014 yang tercatat 44,92%. Nilai rata-rata pemda tersebut masih jauh di bawah akuntabilitas kinerja kementrian/lembaga 65,82% dan pemerintah provinsi 60,47%. Evaluasi ini mencakup perencanaan, penganggaran, kinerja dan pelaporan. Dengan demikian bisa diketahui sejauh mana pemda mengelola anggaran, tidak terjadi pemborosan, dirasakan rakyat dan mampu melaksanakan pertanggungjawaban publik. ( Muhammad Yusuf Ateh 2016)

Dari fenomena diatas penulis menemukan masalah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah masih rendah dilihat dari laporan hasil evaluasi oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Menanggapi fenomena yang terjadi maka penulis melakukan penelitian guna mengetahui keterkaitan antar variabel dengan fenomena yang ada saat ini dengan mengangkat judul “Pengaruh Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.”

### 1.2. Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Seberapa besar pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

### 1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

#### 1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

#### 1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengenai :

1. Besarnya pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Besarnya pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

### 1.4. Kegunaan Penelitian

#### 1.4.1. Keguunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah
   Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi yang positif serta menjadi pedoman dan masukan bagi pemerintah khususnya Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam menilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Bagi Instansi
   Penelitian ini diharapkan memberikan acuan pengambilan keputusan pimpinan instansi pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya dan dalam menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah agar tercapainya tujuan organisasi sektor publik.

#### 1.4.2. Kegunaan Akademis

Adapun kegunaan akademis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti selanjutnya
   Dapat menjadi bahan referensi dan dasar pengembangan bagi penelitian sejenis berikutnya.
2. Bagi perkembangan ilmu akuntansi
   Penelitian ini diharapkan memberikan informasi serta referensi khususnya untuk konsentrasi Akuntansi Sektor Publik tentang pengaruh Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## 2. Kajian pustaka,kerangka pemikiran dan hipotesis

### 2.1. Kajian Pustaka

#### 2.1.1. Pengendalian Akuntansi

Pengendalian Akuntansi menurut Mulyadi (2016:129) sebagai berikut:

“Pengendalian akuntansi merupakan bagian dari sistem pengendalian internal, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoorSatuan Kerja Perangkat Daerahikan terutama menjaga aset organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi”.

### 2.1.2. Sistem Pelaporan

Pada dasarnya kata sistem berasal dari bahasa Yunani “Systema” yang berarti kesatuan, yakni keseluruhan dari bagian-bagian yang mempunyai hubungan satu sama lain.

Pengertian sistem menurut Mulyadi (2016:4) adalah sebagai berikut :

“Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok”.

### 2.1.3. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Tim Studi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah-BPKP, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

“Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik”.

## 2.2. Kerangka Pemikiran

### 2.2.1. Pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pengendalian akuntansi bermanfaat dalam mengukur, mengevaluasi akuntabilitas kinerja dan dapat memotivasi manejer unit bisnis dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan. (Indra Bastian 2011:459)

Pengendalian akuntansi diperlukan untuk pengambilan keputusan operasi agar akuntabilitas kinerja yang diharapkan dapat meningkat. ( Darma 2004)

### 2.2.2. Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. (LAN dan BPKP)

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas bagi keputusan ekonomi, sosial maupun politik.(Deddi 2011:41)

## 2.3. Hipotesis

$H_1$: Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

$H_2$: Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

# 3. Objek dan metode penelitian

## 3.1. Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:28) pengertian objek penelitian yaitu:

“Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Adapun yang menjadi objek penelitian sebagai variabel bebas atau independen variabel adalah pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan dan variabel terikat atau dependen variabel dalam penelitian ini adalah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### 3.2. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan cara penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data untuk mencapai tujuan tertentu.Metode penelitian menurut Sugiyono (2015:2) menyatakan bahwa:

"Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah".

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan.

Pengertian metode deskriptif menurut Sugiyono (2015:147) metode deskriptif adalah sebagai berikut:

"Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi".

Data yang dibutuhkan adalah data yang sesuai dengan masalah-masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga data dapat dikumpulkan, dianalisis, dan ditarik kesimpulan dengan teori-teori yang telah dipelajari.

Menurut Umi Narimawati (2010:290) pengertian metode verifikatif adalah sebagai berikut :

"Metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan".

Metode ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik. Penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Verifikatif menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak.

Menurut Subana dan Sudrajat (2011:25) penelitian kualitatif dilihat dari segi tujuan adalah:

"Penelitian ini dipakai untuk menguji suatu teori, menyajikan suatu fakta atau mendeskripsikan statistik, dan untuk menunjukkan hubungan antar variabel dan adapula yang sifatnya mengembangkan konsep, mengembangkan pemahaman atau mendeskripsikan banyak hal".

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian anilisis deskriptif dan verifikatif yaitu metode yang menggambarkan,menganalisis suatu hasil penelitian dan menguji teori atau suatu cara dengan tanpa perbaikan yang telah di laksanakan di tempat lain di sertai dengan teori-teori yang berhubungan. Dalam Penelitian ini menguji hipotesi dengan menggunkan perhitungan statistik. Penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dapat di simpulkan bahwa metode yang di gunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif.

#### 3.2.1. Desain penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian sangat perlu perencanaan dan perencanaan penelitian, agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sistimatis. Menurut Umi Narimawati (2010 : 30) desain penelitian adalah :

"Semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian".

Desain penelitian merupakan semua proses penelitian yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan penelitian yang dilakukan pada waktu tertentu. Menurut Sugiyono (2008:13) dapat disimpulkan proses desain penelitian meliputi:

1. Sumber masalah
2. Rumusan masalah
3. Konsep dan teori yang relevan dan penemuan yang relevan
4. Pengajuan hipotesis
5. Metode penelitian
6. Menyusun instrumen penelitian
7. Kesimpulan

Berdasarkan proses penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka desain pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Sumber masalah

Membuat identifikasi masalah berdasarkan latar belakang penelitian sehingga mendapatkan judul sesuai dengan masalah yang ditemukan. Identifikasi masalah diperoleh dari adanya fenomena yang terjadi di masyarakat.

2. Rumusan masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Proses
penemuan masalah merupakan tahap peneliti
an yang paling sulit karena tujuan penelitian tidak dapat dilakukan
dengan baik jika masalahnya tidak dirumuskan secara jelas. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah :

1. Seberapa besar pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Seberapa besar pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

3. Konsep dan teori yang relevan dan penemuan yang relevan Untuk menjawab rumusan masalah yang sifatnya sementara (berhipotesis), maka peneliti mengkaji teori-teori yang relevan dengan masalah. Selain itu penemuan penelitian sebelumnya yang relevan juga digunakan sebagai bahan untuk memberikan jawaban sementara terhadap masalah penelitian (hipotesis). Telaah teoritis mempunyai tujuan untuk menyusun kerangka teoritis yang menjadi dasar untuk menjawab masalah atau pertanyaan penelitian yang merupakan tahap penelitian dengan menguji terpenuhinya kriteria pengetahuan yang rasional.

4. Pengajuan hipotesis

Jawaban terhadap rumusan masalah yang baru didasarkan pada teori dan didukung oleh penelitian yang
relevan, tetapi belum ada pembuktian secara empiris (faktual). Berikut hipotesa yang dirumuskan peneliti :

$H_1$: Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

$H_2$: Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

5. Metode penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode analisis deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan
kuantitatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas, sedangkan metode verifikatif digunakan untuk memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan. Metode kuantitatif digunakan untuk memberi skor dan menganalisis menggunakan statistik.

6. Menyusun instrumen penelitian

Setelah metode penelitian yang sesuai dipilih, maka peneliti dapat menyusun instrumen penelitian. Instrumen ini digunakan sebagai alat pengumpul data. Instrumen pada penelitian ini berbentuk kuesioner, untuk pedoman observasi. Sebelum instrumen digunakan untuk pengumpulan data, maka instrumen penelitian harus terlebih dulu diuji validitas dan reabilitasnya. Dimana validitas digunakan untuk mengukur kemampuan sebuah alat ukur dan reabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana pengukuran tersebut dapat dipercaya.

Setalah data terkumpul maka selanjutnya dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang diajukan dengan teknik statistik tertentu. Selanjutnya peneliti menganalisis dan mengambil sampel untuk melakukan penelitian mengenai:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Untuk menganalisis pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Selanjutnya penulis mulai menggunakan perhitungan dengan menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji persamaan strukturan berbasis *variance* atau yang lebih dikenal dengan nama *Partial Least Square* (PLS) menggunakan software *SmartPLS 2.0 M3*.untuk meneliti variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel laten (tidak terukur langsung) yang dapat diukur berdasarkan pada indikator-indikatornya (*variable manifest*), serta secara bersama-sama melibatkan tingkat kekeliruan pengukuran (*error*). Sehingga penulis dapat menganalisis secara lebih terperinci indikator-indikator dari variabel laten yang merefleksikan paling kuat dan paling lemah variabel laten yang mengikutkan tingkat kekeliruannya.

7. Kesimpulan

Kesimpulan adalah langkah terakhir dari suatu periode penelitian yang berupa jawaban atas rumusan masalah. Dengan menekankan pada pemecahan masalah berupa informasi mengenai solusi masalah berupa informasi mengenai solusi masalah yang bermanfaat sebagai dasar untuk pembuatan keputusan.

### 3.2.2. Operasionalisasi variabel

Operasional variabel ini diperlukan untuk menjabarkan variabel-variabel penelitian ke dalam indikator tertentu untuk memudahkan pengukurannya sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pengumpulan data untuk menjawab masalah-masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, untuk menghindarkan kekeliruan dalam menafsirkan masalah, maka dalam penelitian ini penulis membatasi variabel yang akan diukur, sehingga variabel-variabel yang akan diteliti diberi batasan-batasan secara operasional. Penelitian ini menggunakan tiga variabel agar variabel-variabel penelitian dapat dioperasikan. Sesuai dengan judul penelitian tersebut diatas, maka dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang harus diteliti, yaitu variabel independen ($X_1$ dan $X_2$) sebagai variabel bebas dan variabel dependen (Y) sebagai variabel terikat. Adapun penjelasan untuk setiap variabel adalah sebagai berikut :

1.Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Akuntabilitas Kinerja. Skala pengumpulan variabel ini adalah skala ordinal dengan memberikan nilai dan jawaban.

2.Variabel Independen(X)

Variabel indipenden atau variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain yang tidak bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variable X adalah Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan. Skala pengumpulan variabel ini adalah skala ordinal dengan memberikan nilai pada jawaban.

### 3.2.3. Teknik pengumpulan data

Dalam penyusunan usulan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Studi Lapangan ( Field Research)
Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer yang akurat, merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dengan menggunakan usaha-usaha khusus, diantaranya dengan terjun langsung ke instansi melalui penggunaan Kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawabnya.
2.Studi Kepustakaan (Library Research)
Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelah literatur berupa buku-buku (*text book*), peraturan perundang-undangan, surat kabar, artikel, situs web dan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin teori yang diharapkan akan dapat menunjang data yang dikumpulkan dan pengolahannya lebih lanjut dalam penelitian ini.

### 3.2.4. Unit analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Kabupaten Bandung Barat sebanyak 43 SKPD. Unit observasi ini adalah auditor inspektorat yang berjumlah 10 Orang.

### 3.2.5. Teknik penarikan sampel

Adapun teknik penentuan data terbagi menjadi dua bagian, yaitu populasi dan sampel. Pengertian dari populasi dan sampel itu sendiri adalah:

Menurut Sugiyono (2012:115), populasi dapat didefinisikan sebagai berikut:

”Wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”.

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Kabupaten Bandung Barat sebanyak 43 SKPD.

Menurut Sugiyono (2012:81), menyatakan bahwa pengertian sampel dapat dikatakan sebagai berikut:

“Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi”.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa sampel merupakan bagian dari populasi dan dapat mewakili populasi secara keseluruhan. populasi dan dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu *probability sampling* dan *nonprobability sampling.*

Teknik sampling yang digunakan oleh penulis adalah *nonprobability sampling.*
Menurut Juliansyah Noor (2012:154) menyatakan bahwa:

“*Nonprobability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dimana setiap anggota populasi tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama sebagai sampel”.

Jenis *nonprobability sampling* yang digunakan oleh penulis adalah *boring sampling.*
Menurut Juliansyah Noor (2012:151) mengatakan bahwa:

“*Boring sampling* adalah sampel yang mewakili jumlah populasi. Biasanya dilakukan jika populasi dianggap kecil atau kurang dari 100”.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Kabupaten Bandung Barat sebanyak 43 SKPD.

### 3.2.6. Pengujian hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan mengenai populasi yang perlu diuji kebenarannya. Untuk melakukan pengujian dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi, cara ini telah mudah dibandingkan dengan menghitung seluruh anggota populasi. Setelah mendapatkan hasil statistik dari sampel, maka hasil tersebut dapat digunakan untuk menguji pernyataan populasi, apakah bukti empiris dari sampel mendukung atau menolak pernyataan mengenai populasi. Seluruh proses tersebut dikenal dengan pengujian hipotesis.

Menurut Suharyadi dan Purwanto S.K (2009:112) pengujian hipotesis didefinisikan sebagai berikut:

"Pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karenanya harus ditolak".

Terdapat dua hipotesis dalam penelitian ini. Kedua hipotesis ini diuji dengan statistik uji t dengan ketentuan $H_0$ ditolak jika $t_{hitung}$ lebih besar dari nilai kritis untuk α = 0,05 sebesar 1,96.

**1) Hipotesis 1**

Hipotesis pertama adalah Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Persamaan model struktural:

$$\eta = \beta \xi_1 + \zeta$$

Untuk menguji hipotesis penelitian secara parsial dilakukan dengan melalui uji hipotesis statistik sebagai berikut:

$H_o$ : λ = 0 : Pengaruh $\xi_1$ terhadap η tidak signifikan

$H_1$ : λ ≠ 0 : Pengaruh $\xi_1$ terhadap η signifikan

Statistik uji yang digunakan adalah:

$$t = \frac{\beta}{SE(\beta)}$$

Tolak $H_o$ jika $t_{statistik} > t_{kritis}$ pada taraf signifikan. Dimana $t_{kritis}$ untuk α = 0,05 sebesar 1,96.

**2) Hipotesis 2**

Hipotesis kedua adalah Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, Persamaan model struktural:

$$\eta = \gamma \xi_2 + \zeta$$

Untuk menguji hipotesis kedua dilakukan melalui uji hipotesis statistik sebagai berikut:

$H_o$ : λ = 0 : Pengaruh $\xi_2$ terhadap $\eta_2$ tidak signifikan

$H_1$ : λ ≠ 0 : Pengaruh $\xi_2$ terhadap $\eta_2$ signifikan

Statistik uji yang digunakan adalah:

$$t = \frac{\lambda}{SE(\lambda)}$$

Tolak $H_o$ jika $t_{statistik} > t_{kritis}$ pada taraf signifikan. Dimana $t_{kritis}$ untuk α = 0,05 sebesar 1,96.

## 4. Hasil analisis penelitian dan pembahasan

### 4.1. Analisis Penelitian

#### 4.1.1. Pengujian Kualitas Alat Ukur

1. Hasil Pengujian Validitas

Uji validitas digunakan untuk membuktikan sejauh mana validitasan suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan sahih atau valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut serta memiliki nilai koefisien validitas yang lebih besar dari nilai kritis yang ditentukan yakni sebesar 0,3. Hasil ini menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan yang digunakan untuk ketiga variabel telah memiliki persyaratan validitas dan tepat digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data pada penelitian ini.

2. Hasil Pengujian Reabilitas

Alat ukur selain harus valid juga harus memiliki reliabilitas atau keandalan. Suatu alat ukur dapat dikatakan andal jika alat ukur tersebut digunakan berulang kali akan memberikan hasil yang relatif sama (tidak berbeda jauh). Pengujian reliabilitas ini dimaksudkan untuk menguji tingkat konsistensi dari alat ukur penelitian. Dalam penelitian ini, untuk menguji tingkat konsistensi dari alat ukur penelitian digunakan *Spearman Brown*. Suatu konstruk dapat diterima jika memilki nilai koefisien reliabilitas yang lebih besar atau sama dengan 0,7. Dari hasil pengujian reliabilitas, terlihat bahwa nilai koefisien reliabilitas yang diperoleh masing-masing variabel lebih besar dari titik kritis 0,7 yang menunjukan bahwa ketiga variabel yang diuji sudah menunjukan keandalannya sehingga sudah memenuhi syarat untuk digunakan dalam penelitian.

#### 4.1.2. Analisis Deskriptif Pengendalian Akuntansi

Secara keseluruhan dari tanggapan responden, dapat diketahui bahwa nilai persentase skor mengenai variabel pengendalian akuntansi sebesar 67,44%. Nilai 67,44% tersebut jika mengacu pada kriteria cukup baik menurut Umi Narimawati (2007:85) termasuk kategori cukup baik yang berada pada interval 52,01% - 68,00%, sehingga dapat diketahui secara kesuluruhan sudah dinilai cukup baik, terdapat *gap* sebesar 32,56% hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pengendalian akuntansi.

#### 4.1.3. Analisis Deskriptif Sistem Pelaporan

Secara keseluruhan dari tanggapan responden, dapat diketahui bahwa nilai persentase skor mengenai variabel sistem pelaporan sebesar 67,50%. Nilai 67,50% tersebut jika mengacu pada kriteria cukup baik menurut Umi Narimawati (2007:85) termasuk kategori cukup baik yang berada pada interval 52,01% - 68,00%, sehingga dapat diketahui secara kesuluruhan sudah dinilai cukup baik, terdapat *gap* sebesar 32,50% hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam sistem pelaporan.

#### 4.1.4. Analisis Deskriptif Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Secara keseluruhan dari tanggapan responden, dapat diketahui bahwa nilai persentase skor mengenai variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 66,74%. Nilai 66,74% tersebut jika mengacu pada kriteria cukup baik menurut Umi Narimawati (2007:85) termasuk kategori cukup baik yang berada pada interval 52,01% - 68,00%, sehingga dapat diketahui secara kesuluruhan sudah dinilai cukup baik, terdapat *gap* sebesar 33,26% hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### 4.1.5. Hasil Analisis Verifikatif Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan software SmartPLS 2.0 M3, maka hasil analisis verifikatif pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai berikut:

1. Nilai koefisien korelasi pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,549 dan termasuk ke dalam kriteria korelasi sedang. Artinya pengendalian akuntansi yang baik akan diikuti dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang cukup baik pula.

2. Nilai koefisien determinasi ($R^2$) pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 15,05% dan artinya kontribusi pengendalian akuntansi sebesar 15,05% terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sisanya sebesar 84,95%, tetapi 59,07% diantaranya dipengaruhi oleh variable $X_2$ yaitu sistem pelaporan dan sisanya sebesar 25,88 % dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

#### 4.1.6. Hasil Analisis Verifikatif Sistem Pelaporan Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan software SmartPLS 2.0 M3, maka hasil analisis verifikatif sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai berikut:

1. Nilai koefisien korelasi sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,823 dan termasuk ke dalam kriteria korelasi sangat kuat. Artinya sistem pelaporan yang baik akan diikuti dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik pula.
2. Nilai koefisien determinasi ($R^2$) sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 59,07% dan artinya kontribusi sistem pelaporan sebesar 59,07% terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sisanya sebesar 40,93%, tetapi 15,05% diantaranya dipengaruhi oleh variable $X_1$ yaitu pengendalian akuntansi dan sisanya sebesar 25,88% dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

#### 4.1.7. Pengujian Hipotesis

1. Pengujian Hipotesis Pengaruh Pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

   Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat nilai t-hitung yang diperoleh variabel pengendalian akuntansi ($X_1$) sebesar 2,639. Nilai ini lebih besar dari nilai t-tabel 1,96. Karena nilai thitung lebih besar dibanding t-tabel, maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho sehingga Ha diterima. Jadi berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa Pengendalian Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pengujian Hipotesis Pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

   Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat nilai t-hitung yang diperoleh variabel sistem pelaporan ($X_2$) sebesar 7,111. Nilai ini lebih besar dari nilai t-tabel 1,96. Karena nilai thitung lebih besar dibanding t-tabel, maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho sehingga Ha diterima. Jadi berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

### 4.2. Pembahasan

#### 4.2.1. Pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari pengujian yang telah dilakukan hasilnya terdapat hubungan antara pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja sebesar 0,549 yang bernilai positif. Nilai 0,549 menurut sugiono (2011:250) berada pada kategori cukup tinggi. Artinya, semakin baik pengendalian akuntansi yang dilakukan instansi pemerintah maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah itu sendiri akan meningkat.

Terdapat pengaruh antara pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja adalah sebesar 15,05%. Artinya pengendalian akuntansi memberikan pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja sebesar 15,05% pada instansi pemerintah di seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Bandung Barat, sedangkan sebesar 84.95% sisanya adalah pengaruh dari variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti kejelasan sasaran anggaran, pengawasan dan penerapan akuntansi sektor publik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengendalian akuntansi

mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Dengan demikian dapat dikatakan pengendalian akuntansi terbukti secara statistik dapat meningatkan akuntabilitas kinerja. Nuraini (2010) menjelaskan dalam penelitiannya yaitu pengendalian akuntansi diperlukan untuk mengukur, mengevaluasi dan sebagai pengambilan keputusan operasi agar akuntabilitas kinerja yang diharapkan dapat meningkat.

Hal ini menjawab fenomena adanya permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) yaitu sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian dalam pengamanan dan pencatatan, dan kelemahan struktur pengendalian intern yang diungkapkan oleh Azhar Azis.

Hasil tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Indra Bastian (2011:459) bahwa pengendalian akuntansi bermanfaat dalam mengukur dan mengevaluasi akuntabilitas kinerja untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

#### 4.2.2. Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pememrintah

Dari pengujian yang telah dilakukan hasilnya terdapat hubungan antara sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja sebesar 0,823 yang bernilai positif. Nilai 0,823 menurut sugiono (2011:250) berada pada kategori tinggi. Artinya, semakin baik sistem pelaporan yang dijalankan instansi pemeintah maka akan diikuti dengan semakin meingkatnya akuntabilitas kinerja yang dihasilkan.

Terdapat pengaruh antara sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja adalah sebesar 59,07%. Artinya sistem pelaporan memberikan pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja sebesar 59,07% pada instansi pemerintah di seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Bandung Barat, sedangkan sebesar 40,93% sisanya adalah pengaruh dari variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti kejelasan sasaran anggaran, pengawasan dan penerapan akuntansi sector publik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sistem pelaporan mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Dengan demikian dapat dikatakan sistem pelaporan terbukti secara statistik dapat meningatkan akuntabilitas kinerja. Mei Anjarwati (2012) menjelaskan dalam penelitiannya yaitu sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi.

Hal ini menjawab fenomena bahwa nilai akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten bandung barat yang mendapat nilai C terjadi karena kelemahan dalam teknis pelaporan yang disampaikan oleh entitas pelaporan yang diungkapkan Yayat Soemitra.

Hasil tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Dedi (2011:41) bahwa sistem pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas kinerja bagi keputusan ekonomi, soial maupun politik.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Netty Herawati (2011) yaitu hasil penelitian yang menunjukan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## 5. Kesimpulan dan saran

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja dimana pengendalian akuntansi memberikan kontribusi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat. Semakin baik pengendalian akuntansi maka dapat bermanfaat dalam mengukur dan mengevaluasi akuntabilitas kinerja untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

2. Sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja dimana sistem pelaporan memberikan kontribusi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat. Semakin baik sistem pelaporan akan bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas kinerja bagi keputusan ekonomi, soial maupun politik.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka penulis akan memberikan beberapa saran yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam hal ini pemerintah kabupaten Bandung Barat.

### 5.2.1. Saran Praktis

1. Pengendalian Akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat berada dalam kategori cukup baik agar menciptakan akuntabilitas kinerja yang baik perlu adanya pengendalian internal dalam hal ini pengendalian akuntansi pada Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, terutama dalam hal keabsahan pencatatan dan pengamanan yang mendapat nilai presentase terkecil maka sebaiknya dilakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaannya dalam mencatat dan menulis transaksi yang telah terjadi agar dicatat sepenuhnya sesuai dengan fakta dan sumber dokumen dan terlebih dahulu transaksi telah dinilai, dievaluasi, diklasifikasi, dicatat dan diposting secara tepat waktu dan benar untuk menjamin dapat dipercayainya catatan keuangan yang dihasilkan sistem akuntansi dan menjaga aktiva yang dimiliki yang dilakukan untuk dibuat laporannya dan diberikan kepada pihak yang memliki kewenangan dan hanya boleh diakses oleh pihak yang memiliki otorisasi.
2. Sistem pelaporan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat berada dalam kategori cukup baik agar menciptakan akuntabilitas kinerja yang baik perlu adanya sistem pelaporan yang baik agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manager dalam mempertanggungjawabkan sehingga manajemen dapat mengetahui hasil dan pelaksanaan rencana atau pencapaian sasaran yang ditetapkan jangan sampai karna adanya kelemahan dalam teknis pelaporan yang disampaikan oleh entitas pelaporan mempengaruhi penilaian akuntabilitas kinerja suatu instansi meskipun program dilapangan sudah dilakukan sesuai dengan perencanaan, maka perlu di laksanakan perbaikan dalam sistem pelaporan yang dibuat secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya yang dilakukan berkala dan pimpian instansi pemerintah agar terlibat langsung dalam pengukuran dan pelaporan hasil yang dicapai. Pemberian informasi pelaporan ini adalah dalam rangka pemenuhan pertanggungjawaban yang harus dilakukan Kabupaten Bandung Barat.

### 5.2.2. Saran Akademis

1. Bagi Pengembangan Ilmu
   Sebaiknya penelitian ini bisa menambah informasi , sumbangan pemikiran dan kajian dalam penelitian sebagai referensi selanjutnya yang berhubungan dengan pengendalian intern dalam hal ini pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintahan.
2. Bagi Peneliti Lain
   Disarankan pada penelitian berikutnya untuk melakukan penelitian berikutnya dengan metode dan alat ukur yang sama tetapi dengan unit analisis dan sample yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung sesuai teori dan konsep diterima secara umum.

## DAFTAR PUSTAKA


Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah.*Yogyakarta : Salemba Empat

Abdul Halim. Muhammad Iqbal 2013 *Pengelolaan Keuangan Daerah.*Yogyakarta : UPP STIM YKPN

Abdul Hafiz Tanjung. 2014. *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual.* Bandung : Alfabeta

Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*, Edisi Ketiga : Erlangga

Bastian, Indra. 2011. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua : Salemba Empat

BPKP. 2000*. Mengenal Proses Kebijakan Publik*. Jakarta

Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik* Jakarta : Salemba Empat

Ely Suhayati, Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Auditing* Yogyakarta: Graha Ilmu

Harun. 2009. *Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia.* Jakarta : Salemba Empat

Ii Baihaqi Mustafa. 2005. *Tujuh Tulisan Pilihan Akuntansi, Auditing, Akuntabilitas.* Bandung : Multipro

Ismaya Sujana. 2005. *Kamus Akuntansi.*Bandung : Pustaka Grafika

Krismiaji. 2015. *Sistem Informasi Akuntansi.*Yogyakarta: UPP-STIM YKPN

Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Erlangga

Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press

Mahmudi. 2010 *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.* Yogyakarta: UPP-STIM YKPN

Mardi. 2014. *Sistem Informasi Akuntansi.* Bogor : Ghalia Indonesia

Muindro Renyowijoyo. 2013. *Akuntansi Sektor Publik.* Jakarta : Mitra Wacana Media

Mulyadi 2016.*Sistem Akuntansi.* Edisi Keempat.. Jakarta : Salemba Empat

Mursyidi 2013. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia.* Bandung : Refika aditama

Nunuy Nur Afiah. 2010. *Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah.* Jakarta : Kencana

Nur Indrianto dan bambang Supomo. 2002. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen.* Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE

Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta* : ANDI

Siregar, Baldric. 2014. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta : UPP STIM YKPN

Subana, M. Dan Sudrajat. 2005. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah.* Bandung : CV Pustaka Pelajar

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung : Alfabeta

Suharyadi dan Purwanto S.K. 2009. *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Jilid 2.* Jakarta : Salemba Empat

Tanjung, Abdul Hafiz. 2008.*Akuntansi Pemerintahan Daerah : Konsep dan Aplikasi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.*Bandung : Alfabeta

TmBooks. 2015. *Sistem Informasi Akuntansi.* Yogyakarta : Andi

Uma Sekaran. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat

Umi Narimawati. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi.* Bandung : Agung Media

Umi Narimawati dkk. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Bekasi : Genesis

Rujukan dari artikel dalam jurnal :

Abdullah, Hilmi 2005. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntanis, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di daerah Istemawa Yogyakarta*). KOMPAK. No.13, Januari-April 2005 Hal : 26-67

Alfiatu Hidayatullah dan Irine Herdjiono. 2014 *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja SKPD di Merauke.* Unisbank ISBN 978-979-3649-81-8

Darma, Emile S. 2004. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota Se-Provovinsi Daerah Istemawa Yogyakarta).* Simposium Nasional Akuntansi VII, IAI, 2004

Eko Setiawan. 2013.*Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.*JOM FEKON ISSN 2355-66854 Vol.1 No.2

Erwin Agus, 2013 *Faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi empiris pada Kabupaten Jember).*UNEJ

Kusumaningrum, Indraswari. 2010 *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabillitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.*Tesis Universitas Diponegoro: Program Pascasarjana

Mei Anjarwati 2012. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabillitas Kinerja Instansi Pemerintah.* AAJ ISSN 2252-6765 Vol.1 No.2

Netty Herawati 2011. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabillitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi.*JPUJ ISSN 0852-8349 Vol.13 No.2

Nuraini dan Dian Indudewi. 2010. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabillitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Brebes.*SIJALU ISSN 1412-5331 Vol.11 No.4

Reni Yulianti 2014. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kesulitan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabillitas Kinerja Instansi Pemerintah studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pahlawan.* JOM FEKON ISSN 2355-66854 Vol.1 No.2

Rujukan dari dokumen resmi pemerintah:

Republik Indonesia, Inpres RI No.7 tahun 1999. Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

_____, Undang-Undang Dasar 1945 dengan penjelasannya

_____, Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

_____, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

_____, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta

Rujukan dari lembaga:

LAN dan BPKP. 2000 *Akuntabilitas dan Good Governance*, Modul 1, AKIP, Jakarta

LAN dan BPKP. 2001 *Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*,Lembaga Administrasi Negrara Jakarta

Lembaga Administrasi Negara 2003. *Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Jakarta

Rujukan dari internet :
http://print.kompas.com/baca/2016/02/12/Akuntabilitas-Rendah

http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/02/17/361344/nilai-c-untuk-kinerja-pemkab-bandung-barat

http://www.beritasatu.com/ekonomi/360064-dpd-raih-opini-wtp-ke10-dari-bpk.html